
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM MINAPOLITAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NELAYAN

Natalia E Sihombing¹Fina Oktavia Hutasoit²

¹Dosen Prodi Administrasi Bisnis UHN

²Mahasiswa Administrasi Bisnis UHN

natalia.sihombing@uhn.ac.id

ABSTRAK : Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Hal ini merupakan potensi sumber daya terpendam yang sangat besar untuk dikembangkan. Permasalahan utama di kawasan pesisir adalah kualitas dan kesadaran sumber daya manusia rendah, kualitas lingkungan rendah, pendapatan perkapita rendah, serta infrastruktur yang tidak memadai. Untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada terkait dengan pengembangan perikanan maka dibentuklah Program Minapolitan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Program Minapolitan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengetahui apa hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan program Minapolitan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dengan data yang diperoleh dari data primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (studi pustaka).

Tujuan dari Implementasi Program Minapolitan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Study Kasus Pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah) belum sepenuhnya didapatkan karena terdapat perbedaan antara nelayan yang dipekerjakan hingga nelayan yang memiliki kapal dan modal terhadap hasil yang diperoleh.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Minapolitan untuk mensejahterakan nelayan belum sepenuhnya didapatkan. Pemerintah belum sanggup memberikan modal pinjaman kepada nelayan sehingga kebanyakan nelayan lebih memilih untuk berkerja sama dengan pihak swasta yang sanggup memberikan modal. Nelayan yang dipekerjakan oleh para pemilik modal tidak merasakan apa manfaat dari TPI tersebut karena mereka tidak ikut campur lagi pada saat ikan di pasarkan. Adapun manfaat dari Program Minapolitan khususnya yang terjadi di TPI hanya dirasakan oleh nelayan menengah ke atas.

Key Word: *Minapolitan Programs, The Fish Auction, Kecamatan Sarudik*

ABSTRACT: Indonesia is an island nation with huge ocean areas. It is a tremendous latent power source potential to develop. The major problems in coastal areas are the quality and awareness of low human resources, low environmental qualities, low per capita incomes, and inadequate infrastructure. To capitalize on the potential of natural resources associated with the development of fisheries, the minapolitan program was established.

The study is done to find out how the implementation of the minapolitan program in boosting the welfare of fishermen and what obstacles governments face in implementing the minapolitan program to increase the welfare of fishermen at the fish auction (tpe) in the central tapanuli sarong district district is. In this study writers have used descriptive research methods with qualitative analysis with data obtained from primary data (interviews, obseravations) and secondary data (library studies).

The aim of the implementation of the minapolitan program to improve the welfare of fishermen (study cases ata fish auction (tpe) in sarhicks district of tapanuli district) has not been fully obtained because there is a difference between the fishermen who are worked to the fishermen who have boats and capital for the results.

The implementation of the minapolitan program for welfare of fishermen has not been fully obtained. Governments have not been able to provide capital loans to fishermen, so most fishermen prefer to cooperate with private capitalists. The fishermen who are hired by the capitalists don't see the benefits of the PI because they don't interfere when the fish are marketed. As for the benefits of the minapolitan program especially that occurred in the tpe felt only by the upper-middle fishermen.

Key Word: Minapolitan Programs, The Fish Auction, Sarhibist Support

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Hal ini merupakan potensi sumber daya terpendam yang sangat besar untuk dikembangkan. Sektor kelautan dan perikanan sangat dibutuhkan perannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan masih menghadapi masalah dan sekaligus tantangan yang harus diselesaikan dengan kebijakan dan program strategis dan efektif. Upaya mengatasi permasalahan dan tantangan itu diperlukan kebijakan strategis yang inovatif dengan terobosan yang efektif.

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Utara yang secara geografis letaknya berada di pesisir barat Pulau Sumatera dengan luas 2.194,98 km². Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah didominasi oleh perikanan tangkap. Menurut data statistik Tapanuli Tengah dalam Angka 2010, produksi perikanan tangkap pada tahun 2009 mencapai 22.329,40 ton, 20.731,60 ton berasal dari perikanan tangkap di laut. Berdasarkan analisis data statistik perikanan diketahui tingkat pengusahaan perikanan tangkap di laut baru mencapai 10,41% dari potensi yang tersedia. Perikanan laut di sektor budidaya juga memiliki potensi yang besar mengingat wilayah kabupaten ini memiliki garis pantai yang panjang (200 km). Pengelolaan perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 572 yaitu mencakup wilayah Perairan Samudra Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda. Potensi sumber daya Indonesia yang terdapat di WPP 572 berdasarkan informasi

dari Direktorat Jendral Perikanan Tangkap - Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) tahun 2011 sebesar 565.300 ton/tahun. Produksi perikanan tangkap Kabupaten Tapanuli Tengah sendiri pada tahun 2011 mencapai 34.096,7 ton, sedangkan potensi lestari yang tersedia adalah sebesar 317.456 ton/tahun. Adapun yang dimaksud dengan potensi lestari adalah pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan tak pernah habis sehingga dapat diambil hasil panen di tahun berikutnya. Produksi perikanan tangkap masih memungkinkan untuk ditingkatkan, dan terbukti bahwa produksi perikanan dari sektor perikanan tangkap terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 produksi perikanan tangkap mencapai 22.691,1 ton dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 38.401,7 ton.

Permasalahan utama di kawasan pesisir adalah kualitas dan kesadaran sumber daya manusia rendah, kualitas lingkungan rendah, pendapatan perkapita rendah, serta infrastruktur yang tidak memadai. Dengan kondisi demikian, perlu strategi dan metode penanganan yang tepat. Pembangunan prasarana pelabuhan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pembangunan perikanan, seperti tercantum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004, pemerintah berkewajiban untuk membangun pelabuhan perikanan dengan tujuan antara lain untuk menunjang proses motorisasi dan modernisasi unit penangkapan ikan tradisional bertahap dalam rangka memperbaiki usaha perikanan tangkap untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan (pelabuhan perikanan dan saluran irigasi tambak termasuk pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)). Berdasarkan keterangan yang diperoleh dimana produksi perikanan tangkap dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka dibutuhkan prasarana pelabuhan perikanan sebagai wadah bagi nelayan untuk menyalurkan hasil tangkap.

TPI merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan. Pada dasarnya sistem dari Pelelangan Ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi.

Kabupaten Tapanuli Tengah telah memiliki TPI yang terletak di Kecamatan Sarudik. Namun TPI yang ada belum beroperasi secara optimal. Beberapa kendala yang terjadi antara lain :

1. Adanya kendala dalam pembayaran secara tunai kepada nelayan yang disebabkan tersendatnya pembayaran dari para bakul/pihak pembeli.
2. Terjadinya alasan sosiologis dimana nelayan telah menjalin hubungan dengan pemodal dalam hubungan "*patron client*", "*toke*", yaitu juragan/pemodal memberikan fasilitas pinjaman kepada nelayan, dan nelayan mempunyai kewajiban untuk menjual hasil tangkapan kepada juragan di tangkahan.
3. Adanya penjualan ikan diluar TPI dikarenakan mereka akan mendapat uang penjualan secara tunai, kepada para "*toke*"/bandar.

Dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada terkait dengan pengembangan perikanan dalam arti luas, maka diupayakan suatu pendekatan

yaitu perencanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya (Minapolitan). Minapolitan adalah konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip: terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan. Dimana Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi, yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Dengan konsep Minapolitan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Salah satu kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk memajukan kegiatan industri perikanan dan merealisasikan program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah dengan menyediakan prasarana pelabuhan perikanan yang memadai. Prasarana pelabuhan perikanan yang telah ada merupakan basis kegiatan pengadaan produksi perikanan di pantai dan menjadi pusat komunikasi antara kegiatan di wilayah lautan dan daratan. Selain itu dengan adanya upaya bahwa pemasaran ikan harus dirubah yakni dari ikan yang dijual sendiri-sendiri menjadi ikan dijual secara lelang dan terorganisir sehingga harga tidak ditentukan oleh pembeli dan mutu ikan dapat dipertahankan serta nilai jual yang diperoleh nelayan lebih besar. Untuk mengoptimalkan kinerja TPI yang sudah ada selain melengkapi fasilitas pokok, fungsional dan penunjang, diperlukan pengelolaan TPI yang ditetapkan melalui peraturan daerah sebagai pedoman pelaksana. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep. 32/Men/2010 dan perubahan Ketetapan Nomor Kep. 39/Men/2011 dan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep. 18/Men/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan bahwa dengan konsep Minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dipercepat. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) melalui program Minapolitan dimana tempat pelelangan ikan merupakan salah satu sarana dan prasarana penunjang yang sangat penting dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kawasan Minapolitan.

Pemerintahan

Kecamatan Sarudik baru dibentuk pada tahun 2008. Kecamatan Sarudik terdiri dari 4 kelurahan dan 1 desa. Kelurahan yang ada di Kecamatan Sarudik meliputi Kelurahan Sibuluan Nalambok yang terdiri dari 5 lingkungan, Kelurahan Sarudik dengan 6 lingkungan, Kelurahan Pondok Batu dengan 5 lingkungan dan Kelurahan Pasir Bidang dengan 7 lingkungan serta 1 desa yaitu Desa Sipan yang memiliki 3 dusun. Jumlah keseluruhan, Kecamatan Sarudik memiliki 23 lingkungan dan 3 dusu.

Jarak dari ibukota kecamatan ke masing-masing kantor kelurahan/desa relatif tidak terlalu jauh. Jarak tempuh terdekat adalah dari Kantor Kelurahan Sarudik menuju ibukota kecamatan sejauh $\pm 0,5$ km dan jarak terjauh yaitu Desa Sipan ± 8 km. Jarak ini dapat dilalui oleh kendaraan umum seperti angkutan kota dan transportasi daerah lainnya.

Metode Penelitian

Pada bab ini akan dibahas tentang analisis data, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara, study pustaka, dan observasi. Dari ketiga metode ini, peneliti melakukan triangulasi metode dengan tujuan data yang didapatkan menjadi relevan dan reliabel dalam penulisan ilmiah. Triangulasi metode merupakan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, sebagaimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan.

- **Wawancara**

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Terdapat beberapa orang yang menjadi informan dalam penelitian ini yang dianggap dapat memberikan informasi yang diharapkan.

- **Participant Observation**

Participant Observation adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

- **Penelitian Kepustakaan**

Pengumpulan data yang dilakukan yang relevan dengan penelitian melalui buku- buku, majalah, surat kabar, dan literatur yang berkaitan.

Reduksi data merupakan tahap selanjutnya setelah pengumpulan data lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, tema dan polanya. Data mentah yang didapatkan berupa hasil wawancara, onservasi maupun penelitian kepustakaan kemudian direduksi sesuai cakupan penelitian.

Nilai Kandungan	Berdasarkan Data
Komunikasi dalam pelaksanaan Program Minapolitan	<p>Hasil reduksi data wawancara dengan pegawai PPN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paham Pegawai telah memahami Program Minapolitan. Dimana PPN sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan Program Minapolitan telah mengetahui dan memahami apa yang menjadi tujuan dari program ini. Program minapolitan mencakup bidang yang sangat luas salah satunya PPN yang menjadi zona inti dalam program ini. Pegawai yang bekerja di PPN ini telah memahami apa itu minapolitan dengan menjalankan berbagai

	<p>kegiatan, salah satunya mengenai TPI yang merupakan bagian yang terdapat dalam PPN. Komunikasi yang dimaksudkan dalam pelaksanaan program ini adalah dengan adanya peraturan/undang-undang. Sehingga pegawai yang bertugas mengetahui secara pasti tujuan dan sasaran dari program ini. Pemahaman tentang program ini juga dapat dilihat dari adanya pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi yang ada.</p> <p>Agar masyarakat tahu tentang program minapolitan PPN melakukan sosialisasi tentang manfaat PPN itu sendiri.</p> <p>Hasil reduksi data wawancara dengan nelayan di lokasi penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengetahui tapi tidak paham Dari hasil wawancara dengan beberapa nelayan yang berada di PPN Sibolga mengatakan bahwa mereka pernah mendengar tentang Minapolitan tetapi mereka tidak paham apa sebenarnya program tersebut. Mereka datang ke PPN karena mereka tahu di PPN telah tersedia berbagai fasilitas penunjang untuk memudahkan mereka memperoleh bahan bakar, air bersih, es untuk melaut dan terdapatnya TPI untuk memudahkan mereka memasarkan hasil tangkap. Mereka tidak tahu bahwa PPN merupakan bagian dari minapolitan.• Kesimpulan Hasil Observasi wawancara yang dilakukan dengan pegawai PPN tentang Minapolitan dapat disimpulkan bahwa mereka telah memahami Program Minapolitan, baik dengan adanya peraturan/ undang-undang maupun dengan pembagian tugas bagi pegawai. Selain itu salah satu kegiatan rutinitas PPN Sibolga, mengadakan kegiatan rapat evaluasi kinerja seluruh pegawai. Dalam pelaksanaan rapat tersebut, disinilah para pegawai bisa dan harus memberi masukan, ide-ide serta meningkatkan kedisiplinan bekerja dan meningkatkan komunikasi antara atasan dan bawahan. Berbeda dengan hasil wawancara kepada nelayan bahwa mereka hanya mengetahui adanya program minapolitan tetapi tidak paham. Nelayan pernah mendengar tentang program ini tetapi mereka tidak tahu bahwa PPN merupakan bagian dari
--	--

	<p>Minapolitan. Sehingga nelayan yang berada di PPN tidak semuanya melakukan pembongkaran hasil tangkap di TPI milik pemerintah tersebut. Ada beberapa nelayan yang menyatakan bahwa mereka datang bukan untuk melakukan pembongkaran penangkapan tetapi untuk mengisi persediaan selama menangkap ikan seperti membeli es balok, mengisi BBM, pengisian air bersih yang mana harga yang diberikan oleh pemerintah lebih murah dari yang beredar dipasaran. Jadi tidak semua nelayan yang berada di TPI melakukan bongkar muat hasil tangkap. Sosialisasi terhadap program minapolitan yang dilakukan pegawai PPN tidak keseluruhan, mereka hanya mensosialisasikan tentang PPN dan tidak menjelaskan bahwa PPN merupakan bagian dari minapolitan.</p>
<p>Sumber Daya yang bertugas di TPI</p>	<p>Hasil reduksi data wawancara dengan pegawai PPN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah siap Sumber daya atau pegawai yang bekerja di TPI sudah siap dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai yang bekerja di TPI, mereka melakukan tugas dengan baik dengan melakukan pengawasan terhadap proses yang terjadi di TPI. Mulai dari pendaratan kapal hingga terjadi proses pembongkaran ikan di TPI. Fasilitas yang ada di TPI sudah baik ditambah terdapat pabrik es, pengelolaan air bersih, dan pombensin. Sumber daya yang berkerja di PPN telah memiliki jenjang pendidikan yang baik (terlampir) selain itu pada saat melakukan penelitian peneliti melihat bahwa pada saat jam kerja pegawai disiplin dalam menjalankan tugasnya. <p>Hasil reduksi data wawancara dengan nelayan di lokasi penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cukup baik Pegawai yang berada di sekitar TPI sudah cukup baik dalam melakukan tugasnya. Ada beberapa pegawai yang ditempatkan di sekitar TPI untuk mengawasi kegiatan yang berlangsung. Pegawai yang berada di TPI mengarahkan para nelayan pada saat akan melakukan bongkar muat dan menjadi

	<p>pihak perantara antara nelayan dan pembeli.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesimpulan Hasil Observasi wawancara yang dilakukan dengan pegawai PPN dan nelayan dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai yang berada di TPI telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya petugas yang ditempatkan disetiap pos untuk mengawasi kegiatan yang berlangsung, ketika melakukan pengamatan peneliti melihat bahwa ketika jam kerja semua pegawai bekerja dan tidak kelihatan satupun pegawai yang mangkir dari pekerjaannya. Terdapat beberapa pegawai yang bertugas di posko masing- masing, misalnya posko pintu masuk dermaga, yang bertugas mengawasi kebersihan sekitar TPI dan pegawai yang bertugas mengawasi jalannya bongkar muat di TPI. Pegawai yang bertugas di lapangan memiliki sikap ramah. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pegawai salah satu kegiatan rutinitas PPN Sibolga, mengadakan kegiatan rapat evaluasi kinerja seluruh pegawai. Dalam pelaksanaan rapat tersebut, disinilah para pegawai bisa dan harus memberi masukan, ide ide serta meningkatkan kedisiplinan bekerja dan meningkatkan komunikasi antara atasan dan bawahan.
<p>Sikap Pelaksana Kebijakan yang Menangani Pelaksanaan Program Minapolitan khususnya di PPN Sibolga</p>	<p>Hasil reduksi data wawancara dengan pegawai PPN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengangkatan para pelaksana Program Minapolitan dilakukan dalam rapat mengingat Program Minapolitan sangat luas cakupannya dan tidak hanya berada dalam satu lembaga saja. Susunan organisasi PPN ditetapkan berdasarkan PERMEN Kelautan dan Perikanan RI Per.No 06/MEN/2007 tentang organisasi dan tata kerja pelabuhan perikanan. Adapun pegawai yang bekerja di PPN Sibolga merupakan PNS yang merupakan hasil dari seleksi CPNS Kementerian Kelautn dan Perikanan. ✓ Aparat pemerintahan telah memiliki gaji dan tunjangan masing- masing. Pemberian intensif sangat kecil kemungkinan terjadi karena dana yang diperoleh dari negara harus jelas kemana arah dan

	<p>tujuannya. Tapi karena PPN bekerja 24 jam maka apabila seseorang pegawai mempunyai penambahan waktu kerja/ lembur, pemerintah telah menyediakan dana lembur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesimpulan Dari hasil observasi wawancara di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana kebijakan yang dalam hal ini terdiri dari pengangkatan birokrat dan pemberian intensif bahwa yang menangani pelaksanaan Program Minapolitan khususnya di PPN Sibolga ditetapkan berdasarkan PERMEN Kelautan dan Perikanan RI Per.No 06/MEN/2007 tentang organisasi dan tata kerja pelabuhan perikanan. Adapun pegawai yang bekerja di PPN Sibolga merupakan PNS yang merupakan hasil dari seleksi CPNS Kementerian Kelautn dan Perikanan. Dan mengenai pemberian intensif sangat kecil kemungkinan terjadi karena dana yang diperoleh dari negara harus jelas kemana arah dan tujuannya. Aparat pemerintahan telah memiliki gaji dan tunjangan masing- masing. Tapi karena PPN bekerja 24 jam maka apabila seseorang pegawai mempunyai penambahan waktu kerja/ lembur, pemerintah telah menyediakan dana lembur.
<p>Struktur Birokrasi</p>	<p>Hasil reduksi data wawancara dengan pegawai PPN dan berdasarkan studi pustaka : Struktur birokrasi memiliki aspek mekanisme berupa <i>standart operation procedur</i> (SOP) yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam menjalankan tugas, PPN mempunyai standart prosedur kerja. Pegawai telah dibimbing untuk bersikap ramah, sopan, senyum dalam melayani masyarakat. Selain itu, adanya tahapan/ prosedur yang juga harus dipahami masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk menerapkan SOP, PPN mengadakan acara sosialisasi SOP oleh Kasubbag ORTALA Ditjen Perikanan tangkap Bpk.Riston Situmorang bersama tim. SOP (Standart Operasional Prosedure) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan,</p>

	<p>bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, dalam lingkup pemerintah terhadap pelayanan prima.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesimpulan Berdasarkan observasi di lokasi penelitian bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga telah menjalankan standart operasional prosedur kerja yang bermanfaat menjadi pedoman bagi setiap pegawai dalam bertindak agar dalam melaksanakan pekerjaan menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Pegawai telah dibimbing untuk bersikap ramah, sopan, senyum dalam melayani masyarakat. Selain itu, adanya tahapan/ prosedur yang juga harus dipahami masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas SOP, PPN mengadakan acara sosialisasi SOP yang merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, dalam lingkup pemerintah terhadap pelayanan prima.
<p>Implementasi Program Minapolitan khususnya TPI</p>	<p>Hasil reduksi data wawancara dengan pegawai PPN dan studi pustaka :</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan Program Minapolitan sudah berjalan cukup baik di zona inti tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aktifitas yang terjadi di PPN. TPI sebagai bagian dari PPN juga telah berfungsi baik, dimana setiap hari telah terjadi bongkar muat di TPI walau terkadang belum sesuai prosedur. Peningkatnya jumlah hasil tangkapan ikan yang bongkar muat di dermaga dan kemudian dipasarkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPN Sibolga disebabkan karena peningkatan jumlah kunjungan atau berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan di pelabuhan perikanan plat merah itu. Peningkatan jumlah kunjungan ini disebabkan semakin lengkapnya fasilitas maupun sarana prasarana yang ada di PPN Sibolga. Produksi hasil tangkapan oleh kapal perikanan di PPN Sibolga meningkat tajam sejak dermaga dibangun bersama dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Jika sebelumnya saat dermaga masih sekitar 100 meter, jumlah</p>

	<p>kunjungan rata-rata hanya 10 kapal sampai 15 kapal saja per hari, dengan jumlah ikan yang dihasilkan mencapai 25 ton sampai 50 ton per hari. Tapi sejak dermaga diperluas menjadi 400 meter dengan kedalaman minus 7, jumlah kapal yang berlabuh pun kian bertambah secara drastis menjadi rata-rata antara 70 unit sampai 90 unit kapal per hari. Dengan begitu, jumlah hasil tangkapan yang bongkar muat dan dipasarkan di PPN Sibolga ini pun meningkat menjadi rata-rata 200 ton sampai 400 ton per hari.</p> <p>Adapun sistim kerja, ikan masuk ke TPI. Di TPI telah siap beberapa orang untuk membeli ikan yang baru datang. Dari semua orang yang telah menunggu ada beberapa pembeli lokal yang langsung membeli ikan yang telah disepakati sebelumnya kepada para nelayan yang kemudian ikan-ikan tersebut dijual ke daerah-daerah. Ada juga ikan yang dibeli pengusaha untuk kemudian diolah kembali, ada yang di kirim keluar negeri tetapi masi jenis ikan tertentu. Selaku pelabuhan perikanan milik pemerintah, PPN harus terus membenahi pelayanan guna menarik para pelaku industri perikanan untuk menggunakan berbagai fasilitas maupun sarana prasarana serta infrastruktur yang telah dibangun pemerintah untuk pengembangan industri perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesimpulan Kesimpulan yang diperoleh selama observasi di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program minapolitan khususnya yang terjadi di TPI sudah membantu para nelayan dikarenakan telah terdapatnya beberapa fisilitas pendukung untuk memudahkan dalam memisahkan hasil tangkap. Sehingga penentuan harga lebih mudah ditentukan berdasarkan jenis, besar dan kualitas ikan.
<p>Hambatan yang Dihadapi</p>	<p>Hasil reduksi data wawancara dengan pegawai PPN :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hambatan yang ada di PPN, karena sebelum berdirinya PPN sudah ada tangkahan, tempat pendaratan ikan swasta. Dalam pelayanan penagihan jasa yang biaya yang dibutuhkan lebih rendah tetapi nelayan lebih memilih ke tangkahan

	<p>karena lebih dahulu berdiri dan memiliki dana untuk pembiayaan kapal. Dengan perjanjian kapal yang dibiayai membongkar hasil tangkapnya di tangkahan dan kemudian menjual kepada pemilik modal atau pembeli yang bekerja sama dengan pemilik modal. Pelabuhan pemerintah seperti TPI tidak punya dana untuk membiayai kapal karena kekurangan anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jika fasilitas yang ada di TPI sudah memadai otomatis akses nelayan akan semakin mudah untuk mampu meningkatkan kehidupan, tapi semua kembali ke nelayan apakah mau memanfaatkan fasilitas yang telah ada atau bukan. ✓ Selain itu, tidak sedikit nelayan yang merupakan orang yang dipekerjakan oleh pemilik modal atau kapal. Para nelayan mendapat hasil dari bagi hasil kepada pemilik kapal/ modal, nahkoda dan nelayan. Dan dari ketiga pihak tersebut nelayanlah yang memiliki penghasilan lebih kecil karena nelayan hanya bekerja sedang yang menyediakan fasilitas dan mengurus surat adalah pemilik kapal. Dari hasil wawancara dengan nelayan mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pilihan untuk bekerja di tempat lain karena tingkat pendidikan yang rendah pula. • Kesimpulan : Dari hasil observasi wawancara di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hambatan dalam menjalankan fungsi dari PPN Sibolga khususnya pada TPI. Hal ini dikarenakan telah adanya tangkahan milik swasta sebelum PPN berdiri, selain itu pihak swasta sanggup memberi pinjaman modal kepada para nelayan sehingga secara langsung terjadi ikatan antara pemilik modal dan nelayan untuk melakukan bongkar muat ditangkahan bukan di TPI milik pemerintah. Selain itu, tingkat pendidikan nelayan menjadi salah satu hambatan karena nelayan hanya sebagai pekerja yang tidak memiliki apa-apa (hanya mengandalkan tenaga).
<p>Sistem Kerja di TPI</p>	<p>Reduksi Data Wawancara dengan Nelayan di Lokasi Penelitian: Hasil reduksi data wawancara dengan beberapa nelayan menyatakan bahwa bongkar muat yang terjadi di TPI belum sesuai prosedur. Sistem kerja,</p>

	<p>kapal masuk ke dermaga kemudian membawa ikan ke TPI. Di TPI telah siap beberapa orang untuk membeli ikan yang baru datang. Tetapi dengan adanya fasilitas yang ada membuat mudah dalam pemisahan ikan-ikan berdasarkan jenis, ukuran dan kualitas yang cukup memudahkan untuk menentukan harga. Pola pemasaran dan distribusi ikan pada nelayan skala kecil tidak terlalu kompleks, sistem pemasaran ikan hanya berpindah tangan 2-3 kali sebelum sampai ke konsumen lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesimpulan : Kesimpulan yang diperoleh selama observasi di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa TPI belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur hanya saja dengan adanya fasilitas yang ada dapat memudahkan dalam pemisahan ikan hasil tangkap.
<p>Perbedaan Penjualan di TPI dan Langsung kepada Pedagang</p>	<p>Reduksi Data Wawancara dengan Nelayan di Lokasi Penelitian:</p> <p>Hasil reduksi data wawancara dengan beberapa nelayan menyatakan bahwa adanya perbedaan yang diperoleh. Apabila menjual langsung, hasil tangkap langsung diborong tidak peduli ukuran, jenis ikan sehingga harganya sama. Nelayan tiba di tangkahan kemudian langsung menimbang hasil tangkapannya kepada “toke” tanpa terlebih dahulu memilih ikan berdasarkan jenis, ukuran. Sehingga harga yang diperoleh dari hasil tangkap sama. Tetapi jika melakukan penjualan di TPI, hasil tangkap dapat di pilih dulu berdasarkan ukuran, jenis ikannya sehingga memperoleh keberagaman harga. Akan tetapi mayoritas nelayan selalu mendaratkan hasil tangkapannya di tangkahan-tangkahan. Para nelayan memilih mendaratkan hasil tangkapannya di tangkahan disebabkan karena di tangkahan para nelayan bisa menjual ikannya dengan cepat, prosedur pendaratannya lebih cepat dan sederhana, mudah mendapatkan pembeli, biaya lantai dan keamanan lebih murah serta mereka dapat meminjam biaya perbekalan melaut dari pemilik tangkahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesimpulan : Dari hasil observasi wawancara di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa penjualan yang dilakukan di TPI lebih menguntungkan karena terdapat

	<p>keberagaman harga berdasarkan ukuran dan jenis ikan. Akan tetapi masi banyak nelayan selalu mendaratkan hasil tangkapannya di tangkahan-tangkahan. Para nelayan memilih mendaratkan hasil tangkapannya di tangkahan disebabkan karena di tangkahan para nelayan bisa menjual ikannya dengan cepat, prosedur pendaratannya lebih cepat dan sederhana, mudah mendapatkan pembeli, biaya lantai dan keamanan lebih murah serta mereka dapat meminjam biaya perbekalan melaut dari pemilik tangkahan.</p>
<p>Penghasilan Nelayan</p>	<p>Reduksi Data Wawancara dengan Nelayan di Lokasi Penelitian:</p> <p>Hasil reduksi data wawancara dengan beberapa nelayan menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh tidak tetap, melihat cuaca yang ada. Terkadang penghasilan yang diperoleh sanggup mencukupi kehidupan bahkan bisa ditabung tapi sering pula penghasilan tersebut pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak semua nelayan yang berada di TPI mempunyai penghasilan yang sama. Terdapat perbedaan antar nelayan, mulai dari nelayan yang dipekerjakan, nelayan yang memiliki modal tetapi tidak memiliki kapal, dan nelayan yang mempekerjakan (pemilik kapal dan modal). Nelayan yang dipekerjakan memperoleh penghasilan per hari apabila melaut, jika tidak mereka tidak memiliki penghasilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesimpulan : Dari hasil observasi wawancara di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diperoleh nelayan tidak tetap. Hal ini dipengaruhi keadaan cuaca, karena sangat berpengaruh terhadap hasil tangkap yang akan diperoleh. Dimana hasil tangkap ketika badai, terang bulan akan sedikit sedangkan pada saat cuaca baik hasil tangkap menjadi lebih banyak, sehingga dapat mempengaruhi harga jual. Harga jual terhadap hasil tangkap dapat mempengaruhi penghasilan nelayan. Penghasilan yang diperoleh tersubut dapat dikatakan cukup untuk menghidupi keluarga walau dengan keadaan pas-pasan. Tidak semua nelayan yang berada di TPI mempunyai penghasilan yang sama. Terdapat perbedaan antar nelayan, mulai dari nelayan yang dipekerjakan, nelayan yang memiliki

	<p>modal tetapi tidak memiliki kapal, dan nelayan yang mempekerjakan (pemilik kapal dan modal).</p>
<p>Manfaat Program Minapolitan</p>	<p>Reduksi Data Wawancara dengan Nelayan di Lokasi Penelitian:</p> <p>Hasil reduksi data wawancara dengan beberapa nelayan menyatakan bahwa mereka tidak memperoleh manfaat dari Minapolitan karena nelayan tidak mengetahui bahwa TPI merupakan bagian dari minapolitan. Tapi mengenai TPI, beberapa nelayan mengatakan mereka merasa kurangnya manfaat yang diperoleh dari TPI. Karena tidak semua nelayan yang berada di TPI memiliki latar belakang yang sama. Terdapat perbedaan antar nelayan, mulai dari nelayan yang dipekerjakan, nelayan yang memiliki modal tetapi tidak memiliki kapal, dan nelayan yang mempekerjakan (pemilik kapal dan modal). Oleh karena itu setiap nelayan mendapat manfaat yang berbeda dari TPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesimpulan : Dari hasil observasi wawancara di lokasi penelitian dapat disimpulkan bahwa manfaat Program Minapolitan belum sepenuhnya didapatkan. Hal ini dikarenakan tidak semua nelayan yang berada di TPI memiliki kapal sendiri namun para nelayan hanya sebagai pekerja dari pemilik kapal. Sehingga hasil tangkap yang diperoleh nelayan tidak sepenuhnya menjadi miliknya tetapi harus membagi hasil antara nelayan, nahkoda kapal dan pemilik kapal. Selain itu, pemerintah belum sanggup memberikan modal pinjaman kepada nelayan sehingga kebanyakan nelayan lebih memilih untuk berkerja sama dengan pihak swasta yang sanggup memberikan modal.

Berdasarkan hasil reduksi data di atas dan setelah diadakan penelitian dan pengumpulan data di lapangan melalui wawancara dan pengumpulan data kepustakaan, maka diperoleh berbagai data dari informan yang berkaitan dengan Program Minapolitan khususnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Adapun data primer tersebut merupakan hasil wawancara kepada dua orang pegawai yang bertugas dalam bidang operasional dan tiga orang nelayan yang berada di lokasi penelitian tempat pelelangan ikan, yang terlibat dan mengetahui mengenai permasalahan penelitian dan pengamatan langsung. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari surat kabar. Data yang diperoleh

akan disajikan dalam bentuk analisis data. Data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder akan disajikan dalam bentuk deskriptif

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Program Minapolitan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Study Kasus Pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah) adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Program Minapolitan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dilihat dari manfaat TPI telah di implementasikan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aktifitas yang terjadi di PPN. TPI sebagai bagian dari PPN juga telah berfungsi baik, dimana setiap hari telah terjadi bongkar muat di TPI walau terkadang belum sesuai prosedur dan manfaat yang diperoleh belum merata.
2. Dalam melaksanakan Program Minapolitan terdapat hambatan dalam menjalankan fungsi dari PPN Sibolga khususnya pada TPI. Hal ini dikarenakan telah adanya tangkahan milik swasta sebelum PPN berdiri, selain itu pihak swasta sanggup memberi pinjaman modal kepada para nelayan sehingga secara langsung terjadi ikatan antara pemilik modal dan nelayan untuk melakukan bongkar muat ditangkahan bukan di TPI milik pemerintah. Selain itu, tingkat pendidikan nelayan menjadi salah satu hambatan karena nelayan hanya sebagai pekerja yang tidak memiliki apa-apa (hanya mengandalkan tenaga). Tidak sedikit nelayan yang merupakan orang yang dipekerjakan oleh pemilik modal atau kapal. Para nelayan mendapat hasil dari bagi hasil kepada pemilik kapal/ modal, nahkoda dan nelayan. Dan dari ketiga pihak tersebut nelayanlah yang memiliki penghasilan lebih kecil karena nelayan hanya bekerja sedang yang menyediakan fasilitas dan mengurus surat adalah pemilik kapal.
3. Manfaat Program Minapolitan untuk mensejahterakan nelayan belum sepenuhnya didapatkan karena terdapat perbedaan antara nelayan yang dipekerjakan hingga nelayan yang memiliki kapal dan modal. Hal ini dikarenakan tidak semua nelayan yang berada di TPI memiliki kapal sendiri namun para nelayan ada yang hanya sebagai pekerja dari pemilik kapal. Sehingga hasil tangkap yang diperoleh nelayan tidak sepenuhnya menjadi miliknya tetapi harus membagi hasil antara nelayan, nahkoda kapal dan pemilik kapal. Selain itu, pemerintah belum sanggup memberikan modal pinjaman kepada nelayan sehingga kebanyakan nelayan lebih memilih untuk berkerja sama dengan pihak swasta yang sanggup memberikan modal. Nelayan yang dipekerjakan pun tidak merasakan apa manfaat dari TPI tersebut karena mereka tidak ikut campur lagi pada saat ikan di pasarkan. Adapun manfaat dari Program Minapolitan khususnya yang terjadi di TPI hanya dirasakan oleh nelayan menengah ke atas.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dalam mengimplementasikan Program Minapolitan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dilihat dari manfaat TPI telah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi perlu di tingkatkan lagi sehingga manfaat TPI benar-benar dirasakan oleh semua lapisan nelayan bukan hanya nelayan menengah ke atas.
2. Pelaksana Program Minapolitan khususnya di PPN Sibolga harus bergerak lebih aktif mensosialisasikan program tersebut. Sehingga nelayan mengetahui dan memahami bahwa PPN merupakan bagian dari Program Minapolitan.
3. Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini, sebaiknya pemerintah mulai memperhatikan nelayan dari sudut pandang pemberian modal pinjaman sehingga nelayan menengah ke bawah juga merasakan manfaat dari Program Minapolitan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief. 2000. **Teori Pembangunan Dunia Ketiga**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, N William. 2013. **Pengantar Analisis Kebijakan Publik** (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, Hani. **Manajemen** (Edisi Kedua). Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu. 2003. **Manajemen Sumber Daya Manusia** (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 2005. **Penelitian Terapan**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2011. **Public Policy**. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Reksohadiprodjo, Sukanto dan T. Hani Handoko. 1994. **Organisasi Perusahaan** (Edisi Kedua). Yogyakarta: BPFE.
- Sarwono, Jonathan. 2006. **Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang. 2011. **Filsafat Administrasi** (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitorus, Monang. 2013. **Teori Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Evaluasi**. Bandung: UNPAD PRESS.
- Sugyono. 2010. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.